BAB IV

THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF NON-STATE ECONOMIC INTEREST & REPRESSION, LEGITIMACY AND PERFORMANCE

Berdasarkan arahan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, maka adanya kegiatan aktor-aktor non negara yang memberikan dorongan pada sisi lain dimaksudkan agar industri otomotif mobil pedesaan dapat lebih tertata dan terjadi peningkatan dalam hal teknologi dan ekonomi.

Pemerintah yang menjadi kekuatan utama dalam pengambilan kebijakan juga memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mengatur agar aktor-aktor non negara lain yang terlibat dalam pengembangan industri mobil pedesaan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh Presiden. Dengan kata lain pemerintah memaksa untuk menyelaraskan kepentingan aktor non negara tersebut dengan kebijakan industri otomotif mobil pedesaan. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dijelaskan pada point dibawah menunjukkan upaya yang pemerintah lakukan sesuai dengan yang Leftwitch kemukakan berdasarkan indikator-indikator *Developmental State.*

4.1 *The Effective Management of Non-State Economic Interest*

Di dalam strategi *Developmental State* terdapat upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara. Tekanan ini bisa berupa kebijakan-kebijakan yang malah dianggap merugikan kepentingan ekonomi aktor non-negara, namun di jangka panjang mampu memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik sektor ekonomi yang didorong pemerintah. Hal ini juga akan dilihat apa saja

kebijakan pemerintah Indonesia yang menekan aktor-aktor non-negara namun berguna untuk perkembangan dari industri mobil pedesaan tersebut.

A. Upaya peningkatan TKDN melalui IKM-IKM di daerah

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang merekrut IKM-IKM yang ada di daerah seperti yang telah disebutkan pada bab 2, dirasa mampu untuk dapat meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN dalam produksi mobil pedesaan. Hal ini mengingat IKM-IKM yang ada bertugas dalam memasok komponen-komponen yang nantinya akan dirakit menjadi mobil pedesaan.

Kebijakan peningkatan TKDN dirasa sinergis dengan kebijakan transfer teknologi, karena jika produksi mobil pedesaan hanya sebatas pada perakitan, maka perkembangan pesat pada komponen dalam negeri tidak akan tercapai. Pemerintah memiliki tujuan agar peningkatan TKDN yang terdapat dalam mobil pedesaan bisa mencapai minimal 70% bahkan lebih dari sebuah unit mobil pedesaan yang diproduksi (Purnama R. , 2018). Karena dengan meningkatkan TKDN akan membuka peluang kepada pabrik baru ataupun IKM yang ditunjuk untuk pembuatan suatu suku cadang maupun bagian dari kendaraan tersebut akan membawa teknologi yang belum ada di Indonesia sehingga menciptakan upaya transfer teknologi kepada industri kecil menengah yang nantinya akan menangani pembuatan bagian maupun suku cadang dari kendaraan tersebut.

B. Upaya Transfer teknologi kepada Industri Kecil Menengah

Dengan peningkatan TKDN yang terjadi, transfer teknologi secara tidak langsung akan terwujud karena bagian yang sebelumnya diimpor akan diproduksi di Indonesia dan tentunya saja akan terjadi transfer teknologi karena pabrik yang ditunjuk sebagai pembuat bagian tersebut akan mampu untuk menciptakan bagian yang sebelumnya diimpor. Selain dengan menciptakan produk yang sebelumnya diimpor, karyawan dari pabrik tersebut akan mengalami peningkatan kemampuan dalam manufaktur mobil pedesaan. Transfer teknologi merupakan upaya untuk mentransfer perkembangan teknologi dari suatu unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih rendah dalam hal teknologi. Terkait dalam hal transfer teknologi, WTO telah memberikan ketentuan mengenai kerjasama ekonomi dalam berbagai macam kegiatan melalui perjanjian yang disepakati dalam TRIPs (*Trade Related Intelektual Property Rights).* Dimana dalam TRIPs ini ada penerapan terkait mengatur hak kekayaan intelektual, sedangkan pada TRIPs pasal 7 dan Pasal 8 menjelaskan terkait komponen yang juga penting dalam kerja sama ekonomi adalah adanya upaya transfer teknologi. Transfer teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan atas kesejahteraan tersebut bagi masyarakat (Departemen Perindustrian, Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah, 2007, hal. 13-14).

Transfer teknologi menjadi sangat penting bagi pemerintah mengingat pentingnya peningkatan kemampuan untuk memproduksi dan menciptakan komponen-komponen dari mobil pedesaan yang dilakukan oleh Industri Kecil Menengah. Upaya transfer teknologi ini dilakukan secara mandiri oleh PT. Astra International Tbk. sebagai industri otomotif yang telah ada sejak lama dan memiliki teknologi yang mumpuni, sehingga PT. Astra International Tbk. melalui

PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia sebagai anak perusahaannya ditunjuk sebagai salah satu produsen utama dari mobil pedesaan.

IKM-IKM yang terlibat dalam kebijakan industri mobil pedesaan melalui transfer teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi komponen-komponen dari mobil pedesaan itu sendiri seperti kaca, knalpot, suku cadang dan komponen-komponen lainnya. Peningkatan kualitas produksi komponen-komponen ini pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kualitas dari mobil pedesaan sehingga diharapkan dapat bersaing dengan industri otomotif dalam dunia global.

4.2 *Repression, Legitimacy and Performance*

Pada poin ini untuk melihat bagaimana strategi *Developmental State* mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan. Di dalam kebijakan represif ini, memang akan memberikan tekanan dan terkadang menimbulkan adanya tentangan dari masyarakat. Namun, fokus dari poin ini adalah bagaimana kebijakan represif tersebut pada perkembangannya mampu berjalan yang kemudian menunjukkan adanya legitimasi terkait kebijakan yang dipaksakan pemerintah. Selain itu, legitimasi lainnya adalah dengan semakin meningkatnya sektor perekonomian yang didorong oleh pemerintah.

- Wacana Penghilangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM yang akan dihilangkan oleh pemerintah untuk industri mobil pedesaan dapat menekan harga penjualan mobil pedesaan agar dapat menarik minat masyarakat pedesaan agar memiliki ketertarikan untuk membeli produk mobil pedesaan ketimbang membeli produk dari merek dari negara lain yang

terkena PPnBM. Hal ini secara tidak langsung memaksa atau memberikan nilai tambah tersendiri agar masyarakat lebih memilih mobil pedesaan ketimbang mobil pengangkut dari merek luar negeri yang tentu saja terkena PPnBM. Kebijakan ini dapat dianggap sebuah kebijakan yang mengistimewakan produk industri mobil pedesaan dan industri-industri lainnya harus menerima hal tersebut, mengingat ini merupakan arahan langsung dari pemerintah untuk bisa membuat industri otomotif mobil pedesaan berkembang.

Selain dari hilangnya PPnBM untuk mobil pedesaan, masyarakat ditawarkan dengan spesifikasi mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang memiliki pekerjaan seperti petani maupun pedagang. Hal tersebut menjadi daya tarik yang lainnya dari mobil pedesaan ini. Namun, rencana akan penghilangan PPnBM belum dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini untuk dapat menunjang berjalannya industri mobil pedesaan sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan belum fokus dalam membantu perkembangan sektor industri mobil pedesaan melalui kebijakannya.

- Penunjukan langsung PT. Krakatau Steel sebagai pemasok bahan dasar Mobil Pedesaan

PT. Krakatau Steel sebagai salah satu perusahaan nasional yang memproduksi baja di Indonesia, mendapat penunjukan langsung dari Kementerian Perindustrian sebagai pemasok bahan baku utama dalam proses produksi mobil pedesaan. Penunjukan ini merupakan upaya memaksa dari Pemerintah untuk menetapkan pemasok bahan baku produksi. Pada kondisi yang biasa, penentuan pemasok dari suatu proyek atau produksi yang berasal dari pemerintah, biasanya

dilakukan melalui proses yang bernama tender. Tender sendiri dapat di artikan sebagai lelang atau sistem jual beli yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas, kemudian keputusan siapa pemenang proyek tersebut diumumkan dalam tender sehingga diharapkan mencapai transparansi yang baik (Herdiyanti, 2018).

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pengembangan industri otomotif mobil pedesaan ini dilakukan oleh industri dalam negeri dan masyarakat, maka penunjukan langsung pemasok bahan baku produksi yaitu PT. Krakatau Steel dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang represif yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan sektor perekonomian ini. Kebijakan ini sejatinya bukan hanya untuk mobil pedesaan, namun untuk semua industri otomotif di Indonesia termasuk manufaktur besar. Sehingga kebijakan represif ini pada dasarnya tidak memberikan insentif daya saing atau keistimewaan yang cukup baik bagi mobil pedesaan.

- Wacana Penunjukan IKM-IKM sebagai pemasok komponen-komponen Mobil Pedesaan

Wacana penunjukan IKM-IKM di daerah sebagai pemasok komponen-komponen mobil pedesaan merupakan kebijakan Kementerian Perindustrian dengan maksud selain membantu proses produksi mobil pedesaan, juga untuk memajukan Industri Kecil Menengah masyarakat Indonesia. Masalah terkait kurangnya kualitas produksi komponen IKM dibanding produsen lain yang berasal dari industri asing yang berspesialisasi pada pembuatan komponen mobil, dapat diatasi dengan adanya upaya transfer teknologi dari PT. Astra International

dan bantuan riset dan penelitian dari IOI sehingga kedepannya kualitas komponen-komponen dari IKM tersebut dapat bersaing dengan produsen komponen mobil asing.

Wacana ini sejalan dengan kebijakan agar komponen-komponen dari mobil pedesaan sesuai dengan syarat TKDN yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan Kementerian Perindustrian terkait TKDN ini, dilaksanakan oleh PT.KMWI sebagai produsen dari AMMDes dengan cara langsung membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri. Industri komponen dalam negeri ini merupakan IKM-IKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk AMMDes dari PT.KMWI sendiri 70% komponennya saat ini sudah berasal dari IKM tersebut, dan kedepannya akan terus meningkat (Kemenperin, 2018). Pada indikator ini menunjukkan adanya bentuk upaya represi dari pemerintah Indonesia yang sesuai dengan indikator yang dijelaskan Leftwitch dalam teori *Developmental State*, namun untuk legitimasi dan performa masih belum ada. Hal ini juga terkait kebijakan penunjukan IKM masih belum berjalan hingga saat ini karena masih berupa wacana pemerintah dalam memajukan mobil pedesaan sehingga masih belum memberikan dampak yang berarti di lapangan pada saat ini sehingga membuat pihak swasta menginisiasi sendiri kerjasamanya dengan IKM-IKM.

Namun, ternyata hingga saat ini belum ada tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah secara langsung untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif mobil pedesaan. Dengan tidak adanya tindakan represif lanjutan atas wacana-wacana tersebut dari Pemerintah, berakibat pada tidak adanya performa dan legitimasi. Sehingga industri mobil pedesaan ini masih belum

menjadi ancaman bagi industri otomotif luar negeri. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dirumuskan pemerintah sebagai pendukung industri mobil pedesaan hingga saat ini masih berupa sosialisasi dan wacana kebijakan saja. Sehingga daya represi yang dimiliki oleh Pemerintah masih belum ada dan berjalan dan hal ini membuat *performance* dari pemerintah terkait isu mobil pedesaan masih belum dapat dirasakan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia atau pemerintah masih belum sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich karena belum adanya performa dan legitimasi dari kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong kemajuan industri mobil pedesaan (Leftwich, 1995).